

Strategi Penerjemahan Pidato Politik

Muhammad Ersan Pamungkas*

Abstract

This research aims to demonstrate translation techniques adopted by the two translators – Indonesian native speaker and English native speaker in translating five political speeches from Indonesian into English. The research is one by using corpus-based approach, a comparative mode, and translation strategy theories. A qualitative method in the form of a text analysis as a case study is adopted in this research. Analysis of a translation as a product is based on the translation strategies adopted by the the two translators in translating political speeches. The research shows that the two translators apply the same translation strategies. Four methods adopted by the two translators are literal translation method, faithful translation method, semantic translation method, and communicative translation method. The adoption of these four methods also signify two translation ideologies in their translations. In the meantime, nine translation techniques adopted by the two translators are transferensi, calque, literal, cultural equivalence, established equivalence, transposition, modulation, reduction and addition.

Keywords:

political speech, translation of political speech, translation strategies, translation ideologies, translation method, translation technique.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan strategi penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah penutur jati bahasa Indonesia dan penerjemah penutur jati bahasa Inggris dalam menerjemahkan lima pidato politik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis korpus, model komparatif, serta teori strategi penerjemahan. Metode kualitatif berupa analisis teks sebagai sebuah studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Analisis terjemahan sebagai sebuah produk didasarkan pada strategi yang diterapkan kedua penerjemah dalam menerjemahkan pidato politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua penerjemah menerapkan strategi penerjemahan yang sama. Empat metode penerjemahan yang diterapkan kedua penerjemah

* Penerjemah Ahli Madya pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ersanpamungkas83@gmail.com., JL. Veteran No. 18 Jakarta Pusat 10110.

adalah metode penerjemahan harfiah, metode penerjemahan setia, metode penerjemahan semantis, dan metode penerjemahan komunikatif. Penerapan empat metode itu menunjukkan adanya dua ideologi penerjemahan dalam terjemahan keduanya. Adapun sembilan teknik terjemahan diterapkan oleh kedua penerjemah yakni transferensi, kalke, teknik literal, padanan budaya, padanan lazim, transposisi, modulasi, reduksi, dan eksplisitasi.

Kata kunci:

pidato politik, penerjemahan pidato politik, strategi penerjemahan, ideologi penerjemahan, metode penerjemahan, teknik penerjemahan.

1. PENDAHULUAN

Penerjemahan pidato politik adalah salah satu kegiatan penerjemahan yang lazim dilakukan oleh sebagian penerjemah pemerintah di sejumlah K/L di Indonesia. Sebuah orasi dianggap sebagai pidato politik jika disampaikan oleh seseorang dengan jabatan politis, seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, ataupun disampaikan oleh ketua umum partai politik, aktivis politik, atau mahasiswa ketika berunjuk rasa.

Black (2014, hlm. 23) menyatakan bahwa pidato politik adalah “a coherent stream of spoken language that is usually prepared for delivery by a speaker to an audience for a purpose on a political occasion.” Dengan kata lain, pidato politik merupakan ragam lisan yang disiapkan untuk kemudian dibacakan kepada audiens dalam acara yang bersifat politis. Di Indonesia, pertemuan itu berupa acara kenegaraan atau acara resmi.

Menurut ketentuan yang berlaku, pidato politik di Indonesia wajib disampaikan dalam bahasa Indonesia. Dinyatakan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 bahwa “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri” dan Pasal 12 dari peraturan presiden yang sama yang menyatakan, “penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (3) dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.”

Schäffner (1988) menyatakan bahwa naskah pidato politik biasanya dialihbahasakan ke dalam bahasa asing jika isi pidato itu memiliki relevansi bagi masyarakat internasional. Misalnya, ketika pemerintahan baru hendak menyampaikan kebijakan atau program kepada khalayak luas, termasuk dunia internasional. Penerjemahan pidato politik dalam konteks ini bertujuan untuk memperlancar proses diplomasi seperti perundingan atau negosiasi antara delegasi dari sejumlah negara yang tengah berlangsung. Pandangan ini lebih kurang sesuai dengan yang terjadi di Indonesia. Di K/L di Indonesia, pidato politik diterjemahkan ke dalam bahasa asing antara lain untuk dibacakan oleh juru bahasa dalam sebuah acara resmi atau acara kenegaraan. Misalnya, pada penyampaian pidato kenegaraan oleh Presiden Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada setiap bulan Agustus.

Terjemahan pidato politik yang dilakukan oleh penerjemah di K/L juga dapat berfungsi sebagai rujukan resmi bagi tamu asing, organisasi internasional, dan media, terutama media internasional. Terjemahan pidato politik biasanya dipublikasikan melalui situs K/L itu. Pidato politik, terutama yang disampaikan oleh seorang presiden, wakil presiden, atau pejabat tinggi lain, memang memiliki dampak yang cukup besar karena berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan informasi resmi pemerintah. Melalui pidato politik, pemerintah dapat mengumumkan kebijakan, program, pandangan resmi mengenai sebuah kejadian atau peristiwa, imbauan, dan sebagainya. Anggapan ini senada dengan pendapat Erisen (2014, hlm. 469) yang menyatakan, “speeches offer presidents an opportunity to set the agenda, signal their policy preferences, and, among other things, strike an emotional chord with the public.”

Mengingat arti pentingnya pidato politik, penerjemahan pidato politik juga dinilai penting. Kesalahan dalam penerjemahan pidato

politik dapat membawa konsekuensi yang besar. Menerjemahkan pidato politik juga dianggap memiliki tantangan dan masalahnya sendiri. Badran (2001) berpendapat bahwa sebuah teks politis yang sama dapat diterjemahkan berbeda oleh penerjemah yang berbeda dan perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan ideologi atau kebijakan yang bersifat institusional sehingga hasilnya kerap diwarnai dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Beranjak dari penjelasan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan strategi penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah penutur jati bahasa Indonesia (P1) dan penerjemah penutur jati bahasa Inggris (P2) dalam menerjemahkan lima pidato politik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa. Pemilihan kedua penerjemah dengan dua bahasa jati yang berbeda ini berkaitan dengan anggapan bahwa penerjemah sebaiknya menerjemahkan ke dalam bahasa yang paling dikuasainya. Dalam hal ini, salah satu penerjemah, yakni penerjemah penutur jati bahasa Inggris, menerjemahkan pidato ke dalam bahasa yang paling dikuasainya yakni bahasa Inggris.

2. PENERJEMAHAN

Penerjemahan dapat ditinjau dari penekanan dan sudut pandang yang berbeda. Oettinger (1964) menyatakan bahwa penerjemahan adalah proses mentransformasi tanda atau representasi ke dalam tanda atau representasi lain, sementara Catford (1965) berpendapat bahwa penerjemahan adalah proses mengganti materi tekstual dalam BSu dengan padanan materi tekstual di BSa. Adapun Nida dan Tabir (1974) melihat penerjemahan sebagai proses reproduksi pesan dari BSu ke dalam Bahasa Penerima (BPa) dalam padanan pesan yang paling mendekati, baik dari sisi makna maupun gaya. Dalam definisinya, Nida dan Tabir (1974) tidak hanya memasukkan unsur makna saja, tetapi juga memasukkan unsur gaya. Sementara menurut Larson (1984), makna harus dialihkan dan tetap dipertahankan dalam BSa, sedangkan bentuk dapat saja berbeda.

Dari sejumlah pandangan para ahli mengenai penerjemahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penerjemahan pada dasarnya memang sebuah proses perubahan dan reproduksi. Perubahan dan reproduksi itu adalah perubahan atau reproduksi dari materi tekstual atau pesan dari satu bahasa ke dalam bahasa lainnya. Adanya penekanan yang berbeda dari penerjemahan menunjukkan bahwa penerjemahan adalah sebuah fenomena yang kompleks yang dapat dilihat dari beragam penekanan. Sejumlah ahli melihat “inti” atau penekanan itu dengan cara yang berbeda. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya latar belakang para ahli tersebut. Ahli penerjemahan yang berlatar belakang linguistik mungkin akan memandang penerjemahan sebagai kegiatan linguistik, misalnya Nida dan Tabir. Penerjemahan akan memiliki penekanan yang berbeda menurut mereka yang mungkin juga berkecimpung di dunia budaya, politik, atau praktisi penerjemahan sendiri.

2.1. Strategi Penerjemahan

Penerjemahan tidak pernah lepas dari masalah dan tantangan. Untuk mengatasi masalah dan tantangan itu, strategi penerjemahan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam penerjemahan. Sejumlah ahli berpendapat bahwa istilah “strategi penerjemahan” dianggap mencakup istilah lain seperti “prosedur penerjemahan”, “teknik penerjemahan”, dan “metode penerjemahan”.

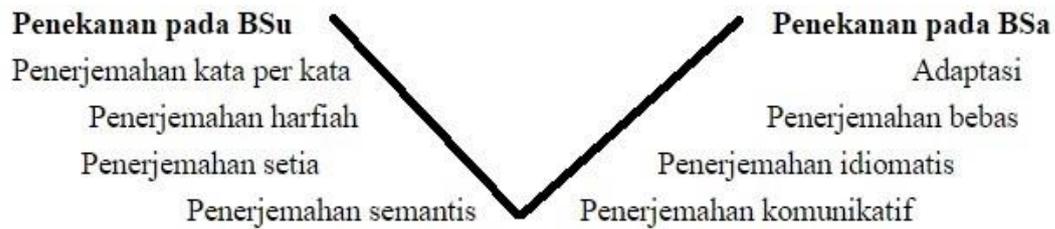
Molina dan Albir (2002) menyatakan bahwa strategi penerjemahan berperan penting dalam memecahkan permasalahan penerjemahan dan merupakan bagian yang penting dalam kompetensi penerjemah. Dalam penelitian ini, istilah “strategi penerjemahan” digunakan untuk mencakup “teknik penerjemahan”, yakni strategi penerjemahan yang digunakan dalam tataran frasa dan kata, dan “metode penerjemahan” yakni strategi penerjemahan yang digunakan pada tataran kalimat dan di atasnya.

2.1.1. Ideologi Penerjemahan

Hatim dan Mason (1997) berpendapat bahwa ideologi adalah sekumpulan asumsi yang mencerminkan kepercayaan dan minat dari individu, sekelompok individu, sebuah institusi sosial yang pada akhirnya diungkapkan dalam bahasa. Ideologi penerjemahan juga dapat diartikan sebagai prinsip atau keyakinan tentang benar atau salah (Hoed, 2013). Secara umum, ideologi dalam penerjemahan dibagi menjadi dua bagian yaitu pengasingan (*foreignization*) dan domestikasi (*domestication*). Ideologi yang cenderung berorientasi pada bahasa sasaran disebut domestikasi, sementara ideologi yang cenderung berorientasi pada bahasa sumber disebut pengasingan.

2.1.2. Writing Lead in Translations

Metode penerjemahan merupakan prinsip yang dianut oleh penerjemah yang mendasari caranya dalam menerjemahkan TSu dari BSu ke dalam BSa yang disesuaikan dengan target pembaca (*audience design*) dan tujuan penerjemahan (*needs analysis*) yang pada akhirnya menentukan jenis atau bentuk terjemahan itu (Hoed, 2006). Newmark (1988) mengusulkan sejumlah metode penerjemahan yang dapat digunakan oleh penerjemah dalam memecahkan masalah penerjemahan. Newmark (1988b) mengungkapkan perbedaan antara “metode penerjemahan” dan “prosedur penerjemahan”. Menurut Newmark, metode penerjemahan berkaitan dengan teks secara keseluruhan, sementara prosedur penerjemahan digunakan untuk kalimat dan unit-unit bahasa yang lebih kecil. Sejumlah metode penerjemahan yang digagas oleh Newmark dikenal dalam penyajian berbentuk Diagram V sebagai berikut.



Bagan 1.1

Diagram V Newmark

2.1.3 Teknik Penerjemahan

Teknik penerjemahan menurut Molina (2002) merupakan prosedur untuk menganalisis dan mengelompokkan sejauh mana kesepadanan makna tercapai dalam terjemahan. Ada lima belas teknik penerjemahan menurut Molina dan Hurtado Albir (2002), yaitu.

1. Adaptasi (adaptation), yakni teknik penerjemahan yang diterapkan dengan mengganti istilah khas teks BSu dengan istilah lain yang diterima dan dikenal dalam BSa.
2. Penambahan (amplification), yakni teknik penerjemahan yang diterapkan dengan cara memperkenalkan atau menambahkan detail informasi yang tidak terdapat dalam teks BSu yakni parafrase eksplisit atau eksplisitasi.
3. Peminjaman (borrowing), yakni teknik penerjemahan dengan mengambil sebuah kata atau ungkapan secara langsung dari BSu. Peminjaman langsung ini disebut peminjaman murni, sedangkan peminjaman yang menggunakan penyesuaian sistem fonetik dan morfologis BSa adalah peminjaman naturalisasi.
4. Kalke (calque), yakni teknik penerjemahan dengan menerjemahkan secara harfiah sebuah kata atau frase BSu secara langsung ke dalam BSa, baik dalam tataran leksikal atau struktural.

5. Kompensasi (compensation), yakni teknik penerjemahan dengan memperkenalkan elemen informasi teks BSu atau efek stilistika yang terdapat pada posisi lain dalam teks BSa karena hal itu tidak dapat tercermin pada posisi yang sama dalam teks BSu.
6. Deskripsi (description), yakni teknik penerjemahan dengan mengganti istilah atau ungkapan dengan deskripsi bentuk dan fungsinya.
7. Kreasi Diskursif (discursive creation), yakni teknik penerjemahan dengan menentukan padanan sementara yang tidak terduga atau di luar konteks.
8. Padanan Lazim (established equivalent), yakni teknik penerjemahan dengan menggunakan istilah atau ungkapan yang sudah diakui/lazim (berdasarkan kamus atau penggunaan bahasa sehari-hari).
9. Generalisasi (generalization), yakni teknik penerjemahan dengan menggunakan istilah yang lebih umum atau netral dalam BSa. Misalnya, kata *to stroll* dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi berjalan dalam bahasa Indonesia.
10. Amplifikasi Linguistik (linguistic amplification), yakni teknik penerjemahan dengan menambah elemen linguistik. Teknik ini sering digunakan dalam penjurubahasaan secara konsekutif (consecutive interpreting) dan sulih suara (dubbing).
11. Kompresi Linguistik (Linguistic Compression), yakni teknik penerjemahan dengan mengumpulkan dan menjadikan satu elemen-elemen linguistik dalam teks BSa. Teknik ini sering digunakan dalam penjurubahasaan secara spontan dan subtitling.

12. Terjemahan Harfiah (Literal Translation), yakni teknik penerjemahan dengan menerjemahkan sebuah kata atau ungkapan kata demi kata.
13. Modulasi (modulation), yakni teknik penerjemahan dengan mengganti sudut pandang, fokus atau kategori kognitif dalam hubungannya dengan teks BSu; bisa dalam tataran leksikal atau struktural.
14. Partikularisasi (particularization), yakni teknik penerjemahan dengan menggunakan istilah yang lebih kongkret atau khusus. Teknik ini adalah lawan dari teknik generalization.
15. Reduksi (reduction), yakni teknik penerjemahan dengan menekan atau memadatkan fitur informasi teks BSu ke dalam teks BSa.
16. Substitusi (substitution), yakni teknik penerjemahan dengan menggantikan elemen linguistik ke dalam elemen paralinguistik atau sebaliknya.
17. Transposisi (transposition), yakni teknik penerjemahan dengan mengganti kategori gramatikal.
18. Variasi (variation), yakni teknik penerjemahan dengan mengganti elemen linguistik atau paralinguistik (intonasi, gesture) yang berdampak pada variasi linguistik.

Newmark (1988) juga menawarkan sejumlah teknik penerjemahan yang dapat digunakan oleh penerjemah. Dalam hal ini, Newmark menyebutnya dengan istilah “prosedur penerjemahan”. Adapun prosedur penerjemahan yang diusulkan oleh Newmark antara lain sebagai berikut:

1. Transferensi, yakni teknik penerjemahan dengan cara “memungut” kata atau istilah TSu ke dalam TSa.

2. Naturalisasi, yakni teknik penerjemahan dengan cara mengadaptasi kata dalam BSu menjadi pelafalan dan struktur morfologi yang alami dalam BSa (Newmark, 1988).
3. Kalke, yakni teknik penerjemahan dengan menerjemahkan kata/frasa dari BSu secara literal.
4. Modulasi, yakni teknik penerjemahan dengan teknik penerjemahan dengan mengubah sudut pandang, fokus, atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan BSu dan Perubahan sudut pandang itu dapat bersifat leksikal atau struktural.
5. Padanan Budaya, yakni teknik yang dilakukan dengan memberikan padanan berupa unsur kebudayaan yang ada dalam BSa.
6. Kesepadanan Deskriptif, yakni teknik penerjemahan dengan menambahkan uraian atau penjelasan yang berisi makna kata yang bersangkutan dikarenakan penerjemah yang tidak dapat menemukan padanan kata dalam TSu, baik itu karena ketidaktahuan atau memang belum ada padanannya dalam BSa.
7. Generalisasi, yakni teknik penerjemahan yang dilakukan untuk menerjemahkan sebuah istilah khusus dengan menggunakan istilah yang lebih umum.
8. Partikularisasi, yakni teknik penerjemahan dengan menerjemahkan sebuah istilah umum dengan istilah khusus. Dengan kata lain, teknik ini adalah kebalikan dari Teknik Penerjemahan Generalisasi.
9. Penjelasan Tambahan/Eksplisitasi, yakni teknik penerjemahan dengan menambahkan keterangan spesifik yang tersirat dalam TSu (Vinay & Darbeinet 9).
10. Pengurangan, yakni teknik penerjemahan dengan mengurangi kata dalam TSu.

11. Penerjemahan Resmi, teknik penerjemahan yang langsung menggunakan sejumlah istilah, nama dan ungkapan yang sudah baku atau resmi dalam BSa.
12. Penerjemahan Catatan Kaki, yakni memberikan keterangan dalam bentuk catatan kaki atau catatan akhir. Teknik penerjemahan ini dapat digunakan pada penerjemahan seperti teks hukum.
13. Penerjemahan Fonologis yakni menyesuaikan kata pinjaman dari TSu dengan sistem bunyi (fonologi) dan ejaan (grafologi) BSa.

3. Penerjemahan Pidato Politik

Menurut Livnat dan Lewin (2016), pidato politik merujuk kepada pidato yang disampaikan dalam latar publik oleh seorang aktor politis seperti presiden, perdana menteri, anggota parlemen, atau kandidat pejabat tinggi negara dalam perannya sebagai politikus selama masa jabatannya di lingkungan politis. Definisi ini dapat dianggap relevan dengan yang terjadi di Indonesia karena sebuah pidato dianggap sebagai sebuah “pidato politik” jika disampaikan oleh seseorang yang memiliki jabatan politis.

Black (2014, hlm. 23) menyatakan bahwa pidato politik adalah “a coherent stream of spoken language that is usually prepared for delivery by a speaker to an audience for a purpose on a political occasion.” Dengan kata lain, pidato politik menurut Black adalah bahasa lisan yang disiapkan untuk dibacakan kepada audiens untuk acara politis. Dapat juga dikatakan bahwa pidato politik merupakan ragam lisan yang disiapkan untuk kemudian dibacakan kepada audiens dalam acara yang bersifat politis. Di Indonesia, acara itu meliputi acara kenegaraan atau acara resmi. Yang juga dapat digarisbawahi dari definisi ini adalah konsep “to be prepared,” yang bermakna bahwa pidato politik hanya merujuk kepada pidato yang sudah disiapkan walaupun dalam praktiknya seperti di Indonesia,

sebagian pidato politik juga dapat disampaikan dengan tanpa harus disiapkan terlebih dahulu (impromptu).

Wodak (2004, hlm. 381) menyatakan, "political speeches are a special kind of discourse that 'produce and reproduce beliefs, opinions, and ideologies and political discourses are more about beliefs, opinions and ideologies constructed from a partisan perspective than an individual choice."

Berdasarkan sejumlah definisi pidato politik di atas, dapat dikatakan bahwa pidato politik merujuk kepada orang yang membacakannya, yang dalam hal ini adalah politikus yang berpidato untuk menghasilkan dan menghasilkan kembali keyakinan, opini, dan ideologinya. Anggapan ini sejalan dengan pendapat Erisen (2014, hlm. 469) yang menyatakan, "speeches offer presidents an opportunity to set the agenda, signal their policy preferences, and, among other things, strike an emotional chord with the public."

Badran (2001) berpendapat bahwa sebuah teks politik yang sama dapat diterjemahkan berbeda oleh penerjemah yang berbeda dan perbedaan itu dapat dipengaruhi oleh perbedaan ideologi atau kebijakan yang bersifat institusional sehingga hasil terjemahan seringkali diwarnai dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara Ali (2007, hlm. 26) menyatakan, "translating political texts is problematic due to ideological factors that is involved in the political discourse." Ali juga menyatakan bahwa pidato politik bersifat "sensitif" sehingga perlu teknik khusus dalam menerjemahkannya. Newmark (1996, hlm. 46) berpendapat, "translation of political language is an abstraction of an abstraction". Konsekuensinya adalah bahwa dalam menerjemahkan pidato politik, penerjemah harus menafsirkan dulu kata atau frasa di dalam Teks Sumber (TSu) sebelum mengungkapkan pesannya ke dalam Teks Sasaran (TSa).

Menurut Mulyana (1999), struktur sebuah pidato dapat digambarkan secara sederhana pada bagan berikut.

_____	addresses greetings	(penyampaian kepada hadirin) (tabik salam)

_____	opening/introduction (bagian pembuka)	

_____	body (isi pidato)	

_____	closing (bagian penutup)	

_____	thanking (ucapan terima kasih atas perhatian hadirin)	

Bagian 2.1

Pidato Menurut Mulyana (1999)

Berdasarkan bagan di atas, ada lima bagian utama pidato politik, yakni bagian addresses dan greetings, bagian pembukaan yang pada umumnya berisi tentang gambaran umum tentang pidato yang akan disampaikan, bagian isi, bagian penutup (closing), dan bagian ucapan terima kasih (thanking).

Dalam pidato politik di Indonesia, bagian addresses lazimnya berisi sapaan kepada sejumlah tamu istimewa yang hadir seperti menteri, pejabat tinggi negara, duta besar, dan lain sebagainya, sementara bagian greetings biasanya berupa salam umum (selamat pagi, selamat malam, dll.) dan salam bernuansa keagamaan seperti “Assalamualaikum”, “Salam sejahtera untuk kita semua”, “Om Swastiastu”, dan lain sebagainya. Bagian pembukaan berisi poin - poin yang akan disampaikan dalam pidato atau penyampaian topik pidato. Isi pidato dapat beragam, bergantung dari acara di mana pidato itu disampaikan. Untuk bagian penutup, seperti halnya bagian pembuka, juga lazimnya berupa sapaan umum atau sapaan

bernuansa keagamaan seperti “Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh”. Sementara bagian ucapan terima kasih berisi ungkapan terima kasih atau apresiasi dari yang menyampaikan pidato kepada hadirin.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan ancangan kualitatif. Menurut Mackey dan Gass (2005), penelitian yang menggunakan ancangan kualitatif mengacu kepada penelitian yang didasarkan pada data deskriptif yang tidak menggunakan prosedur statistis. Ancangan kualitatif digunakan untuk membandingkan strategi penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah penutur jati bahasa Indonesia dan penerjemah penutur jati bahasa Inggris dalam penerjemahan lima pidato politik.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif yang didasarkan pada model komparatif ($TSu \approx TSa1$ dan $TSu \approx TSa2$) untuk membandingkan strategi penerjemah yang diterapkan kedua penerjemah. Dalam penelitian ini, “strategi penerjemahan” digunakan untuk mencakup “metode penerjemahan” dan “teknik penerjemahan”. Penelitian ini menerapkan gabungan dari kajian teks dan penelitian lapangan karena menggabungkan data dari hasil terjemahan pidato politik penerjemah penutur jati bahasa Indonesia dan hasil terjemahan penerjemah penutur jati bahasa Inggris, serta masukan dari dua orang responden.

Sumber data untuk penelitian ini adalah lima pidato politik Presiden Joko Widodo dalam bahasa Indonesia (TSu) dan dua versi terjemahannya dalam bahasa Inggris (TSa) karya satu orang penerjemah penutur jati bahasa Indonesia (P1) dan satu orang penutur jati bahasa Inggris (P2). Adapun penelitian ini melibatkan dua orang penerjemah yang menerjemahkan lima pidato politik Presiden Joko Widodo dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kedua orang penerjemah tersebut adalah Andriaji Gumilang

(Penerjemah Penutur Jati Bahasa Indonesia/P1) dan Sue Piper (Penerjemah Penutur Jati Bahasa Inggris/P2).

5. Strategi Dalam Penerjemahan Pidato Politik

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam terjemahan bahasa Inggris lima pidato politik karya P1 dan P2, teridentifikasi dua kutub ideologi penerjemahan, yakni ideologi domestikasi dan ideologi pengasingan. Identifikasi dua kutub penerjemahan ini didasarkan metode penerjemahan dan teknik penerjemahan yang diterapkan kedua penerjemah.

Temuan dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa penerjemahan pidato politik merupakan kompromi antara ideologi domestikasi dan ideologi pengasingan. Dalam beberapa bagian pidato politik, teridentifikasi terjemahan yang berorientasi pada BSu (ideologi pengasingan), misalnya ketika sejumlah kalimat tidak diterjemahkan atau ketika unsur BSu dipertahankan di dalam penerjemahan (misalnya, kata “assalamualaikum” tetap dipertahankan di dalam terjemahan). Sementara pada bagian lain dari pidato, teridentifikasi juga terjemahan yang berorientasi pada BSa (ideologi domestikasi), misalnya ketika menerjemahkan sapaan dan salam (“hadirin sekalian” dipadankan menjadi “ladies and gentlemen”).

Teridentifikasinya dua kutub terjemahan dalam terjemahan pidato politik P1 dan P2 juga menunjukkan bahwa dalam penerjemahan pidato politik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, juga ditemukan fenomena “double-bind relationship” (House, 2014), yang berarti bahwa dalam terjemahan pidato politik, unsur BSu, yang dalam hal ini bahasa Indonesia, masih ditemukan dalam terjemahan bahasa Inggris, sementara unsur BSa, yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris, juga ditemukan, misalnya dengan penerapan teknik padanan budaya, struktur kalimat yang disesuaikan dengan sistem gramatika bahasa Inggris, dan sebagainya. Dengan kata lain,

dalam terjemahan pidato politik, unsur budaya BSu dan unsur BSa ditemukan.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa terjemahan pidato politik

P1 dan P2 adalah terjemahan bahasa Inggris dari pidato bahasa Indonesia yang tidak dapat disejajarkan dengan pidato yang ditulis dalam bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena beberapa fitur yang lazim pidato bahasa Indonesia biasanya akan tetap dipertahankan di dalam terjemahan Inggris sehingga terjemahan yang dihasilkan dapat juga dianggap sebagai “versi bahasa Inggris dari pidato bahasa Indonesia.” Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar antara “terjemahan bahasa Inggris dari pidato bahasa Inggris” dengan “pidato yang ditulis dalam bahasa Inggris.” Ketika sebuah pidato berbahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, unsur bahasa Indonesia diasumsikan akan tetap berada dalam terjemahan itu karena beberapa elemen seperti salam yang bernuanasa keagamaan, memang harus dipertahankan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pidato itu sendiri. Fenomena ini juga mungkin ditemukan dalam terjemahan teks lain seperti novel atau teks hukum. Ketika sebuah novel yang ditulis dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya, terjemahan bahasa Inggris dari novel itu tidak akan sepenuhnya “lepas” dari unsur budaya bahasa Indonesia. Temuan dalam penelitian ini juga menemukan gejala yang sama dalam penerjemahan penerjemahan pidato politik.

Beberapa bagian dalam pidato politik seperti bagian salam dan bagian sapaan memang sebaiknya diterjemahkan dengan menggunakan ideologi domestikasi karena jika diterjemahkan dengan metode penerjemahan setia dan teknik penerjemahan literal misalnya, terjemahannya dapat dikhawatirkan tidak akan berterima. Selain itu, dapat diasumsikan juga bahwa setiap bahasa memiliki frasa sapaan

pidato yang khas. Misalnya, dalam bahasa Indonesia dikenal frasa sapaan seperti “hadirin sekalian” atau “saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air”, sementara dalam bahasa Inggris pun memiliki frasa sapaan pidato yang khas seperti “ladies and gentlemen”, “distinguished guests,” “my fellow countrymen,” dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menerjemahkan dari ungkapan salam dan sapaan itu memang sebaiknya dilakukan dengan memiliki ungkapan salam dan sapaan yang lazim dalam BSA.

Jika dikaitkan dengan penerjemahan pidato politik secara keseluruhan, pada terjemahan dalam sebagian besar pidato politik, akan juga ditemukan dua kutub penerjemahan ini karena format pidato politik pada umumnya sama. Yang membedakan satu pidato politik dengan pidato politik lainnya adalah isi. Selain itu, seperti halnya jenis teks formal lainnya seperti teks hukum, surat formal, pidato politik juga memiliki format baku yang ditemukan dalam hampir seluruh pidato politik. Misalnya, pada sebagian besar pidato politik, akan ditemukan ungkapan sapaan dan salam, termasuk salam yang bernuansa keagamaan dan di antara paragraf pidato, akan ditemukan sapaan seperti “hadirin sekalian,” dan sebagainya.

Jika dibandingkan dengan penerjemahan teks hukum yang dianggap lebih cenderung berorientasi kepada BSA dan penerjemahan teks sastra yang dianggap cenderung lebih berorientasi kepada BSA, penerjemahan pidato politik dapat dikatakan berada di antara keduanya. Pada satu sisi, akurasi terjemahan politik dituntut harus dapat harus tinggi seperti halnya pada penerjemahan teks hukum karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, salah satu fungsi pidato politik adalah untuk menyampaikan kebijakan, program atau pandangan mereka. Oleh karena itu, terjemahan pidato politik dituntut untuk dapat seakurat mungkin dan semua pesan dapat tersampaikan.

Ketidakakuratan terjemahan pidato politik dapat membawa konsekuensi yang besar karena dampak dari sebuah pidato politik dan terjemahannya cukup besar. Pentingnya akurasi dalam terjemahan pidato politik juga karena banyak pidato politik yang berisi data faktual, angka statistik, kebijakan dan program pemerintah, dan lain-lain sehingga terjemahan pidato politik semestinya menyampaikan semua hal tersebut dengan tingkat akurasi yang tinggi. Akan tetapi, ketika diterjemahkan ke dalam BSA, misalnya bahasa Inggris, beberapa bagian dari terjemahan pidato politik itu harus juga mampu dimengerti oleh pembaca dan pendengar BSA. Misalnya, bagian penyampaian salam dan sapaan. Dalam hal ini, salam dan sapaan itu memang sebaiknya dipadankan dengan salam dan sapaan yang lazim di dalam bahasa Inggris agar terdengar beretima dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, menerjemahkan dari salam dan sapaan itu seharusnya merujuk kepada ideologi penerjemahan yang berorientasi pada BSA (ideologi pengasingan). Hal ini sesuai dengan pendapat Larson (1984) bahwa dalam penerjemahan pidato politik, bentuk dan makna sama pentingnya dan kompromi antara keduanya sangat penting.

Teridentifikasinya dua kutub ideologi penerjemahan dalam terjemahan lima pidato politik juga P1 dan P2 juga berdasarkan metode penerjemahan dan teknik penerjemahan yang diterapkan kedua penerjemah karena metode penerjemahan dan teknik penerjemahan menentukan ideologi penerjemahan yang dianut Molina dan Albir (2002). Secara terperinci, strategi penerjemahan - yang dalam penelitian ini mencakup metode penerjemahan dan teknik penerjemahan - yang diterapkan oleh P1 dan P2 digambarkan pada Tabel 4.1 berikut.

TABEL 1.1

Strategi Penerjemahan Dalam Terjemahan P1 Dan P2

Ideologi Penerjemahan Domestikasi	Metode Penerjemahan Harfiah	Teknik Penerjemahan Literal
		Teknik Kalke
	Metode Penerjemahan Setia	Teknik Transferensi
		Teknik Eksplisitasi
Metode Penerjemahan Semantis	Teknik Reduksi	
	Teknik Transposisi	
	Teknik Modulasi	
Ideologi Penerjemahan Pengasingan	Metode Penerjemahan Komunikatif	Teknik Padanan Lazim
		Teknik Padanan Budaya

Dari segi metode penerjemahan dan teknik penerjemahan, penelitian ini tidak menemukan perbedaan signifikan dalam penerapan di dalam terjemahan P1 dan P2. Empat metode penerjemahan di atas diterapkan dalam terjemahan P1 dan P2, sementara untuk teknik penerjemahan, sembilan teknik terjemahan tersebut juga teridentifikasi dalam terjemahan pidato politik P1 dan P2 meskipun ditemukan perbedaan dalam penerapannya. Penelitian ini juga tidak menemukan teknik penerjemahan tertentu yang secara eksklusif digunakan oleh salah satu penerjemah. Sembilan teknik terjemahan di atas diterapkan oleh P1 dan P2 dalam menerjemahkan lima pidato politik. Empat metode lain yakni metode penerjemahan lain yakni metode kata-per-kata, metode penerjemahan bebas, metode penerjemahan adaptasi, dan metode penerjemahan idiomatis tidak teridentifikasi dalam terjemahan pidato politik P1 dan P2.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa berdasarkan strategi penerjemahan yang diterapkan, dapat dikatakan bahwa terjemahan keduanya dapat dikatakan memiliki kualitas yang sama kendati bahasa jati dari kedua penerjemah berbeda. Hasil ini dapat membantah anggapan bahwa penerjemah sebaiknya menerjemahkan ke dalam bahasa yang paling dikuasainya. Jika merujuk pada anggapan ini, sebetulnya terjemahan penerjemah penutur jati bahasa

Inggris sejatinya lebih baik daripada terjemahan penutur jati bahasa Inggris, atau terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal penerapan strategi penerjemahan. Akan tetapi, yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa strategi penerjemahan yang diterapkan kedua kedua penerjemah secara umum sama sehingga memberi gambaran mengenai kualitas terjemahan kedua penerjemah dan bagaimana kedua penerjemah melakukan pendekatan dalam proses penerjemahan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa kalimat, terjemahan penutur jati bahasa Indonesia lebih akurat dibandingkan dengan terjemahan penutur jati bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerjemahan, termasuk dalam penerjemahan pidato politik, pemahaman TSu berperan penting, seperti halnya proses memproduksi TSu ke dalam TSa. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa penerjemah penutur jati bahasa Indonesia memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap TSu yang ditulis dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan pemahaman penerjemah penutur jati bahasa Inggris. Dalam penerjemahan, komprehensi BSu adalah hal yang penting dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penerjemahan. Komprehensi juga dapat memengaruhi terjemahan. Nida (1996) menggambarkan proses penerjemahan dalam bagan berikut.



BAGAN 1.2

Tahap-Tahap Penerjemahan Menurut Nida (1966)

Berdasarkan bagan di atas, bagian “analisis” sama dengan bagian “komprehensi” dan bagian ini adalah bagian yang “setara” atau sama pentingnya dengan bagian restrukturisasi atau bagian reproduksi pesan dalam sebuah proses penerjemahan sehingga jika terjadi kekeliruan dalam proses analisis atau proses komprehensi, maka kualitas terjemahan akan terdampak. Dalam kasus penerjemahan yang dilakukan oleh penutur jati bahasa Indonesia dan penutur jati bahasa Inggris, dapat diasumsikan bahwa penutur jati bahasa Indonesia dapat memiliki komprehensi yang lebih baik dibandingkan dengan penutur jati bahasa Inggris karena TSu ditulis dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, penutur jati bahasa Inggris diasumsikan dapat melakukan restrukturisasi atau reproduksi pesan yang lebih baik karena penerjemahan dilakukan ke dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, sebetulnya dapat dikatakan bahwa dalam proses penerjemahan ini, kedua penerjemah memiliki “kelebihan”-nya sendiri. Penerjemah penutur jati bahasa Indonesia dianggap lebih baik dari segi komprehensi, sementara penerjemah penutur jati dianggap lebih baik dari segi reproduksi. Peneliti ini berpendapat bahwa anggapan bahwa penerjemah sebaiknya penerjemah menerjemahkan ke dalam bahasa yang paling dikuasainya seperti yang digagas oleh sejumlah ahli perlu ditinjau ulang, utamanya dari sisi komprehensi TSu.

Adapun secara garis besar, metode dan teknik penerjemahan yang diterapkan P1 dan P2 dalam menerjemahkan pidato politik ditunjukkan dalam tabel berikut

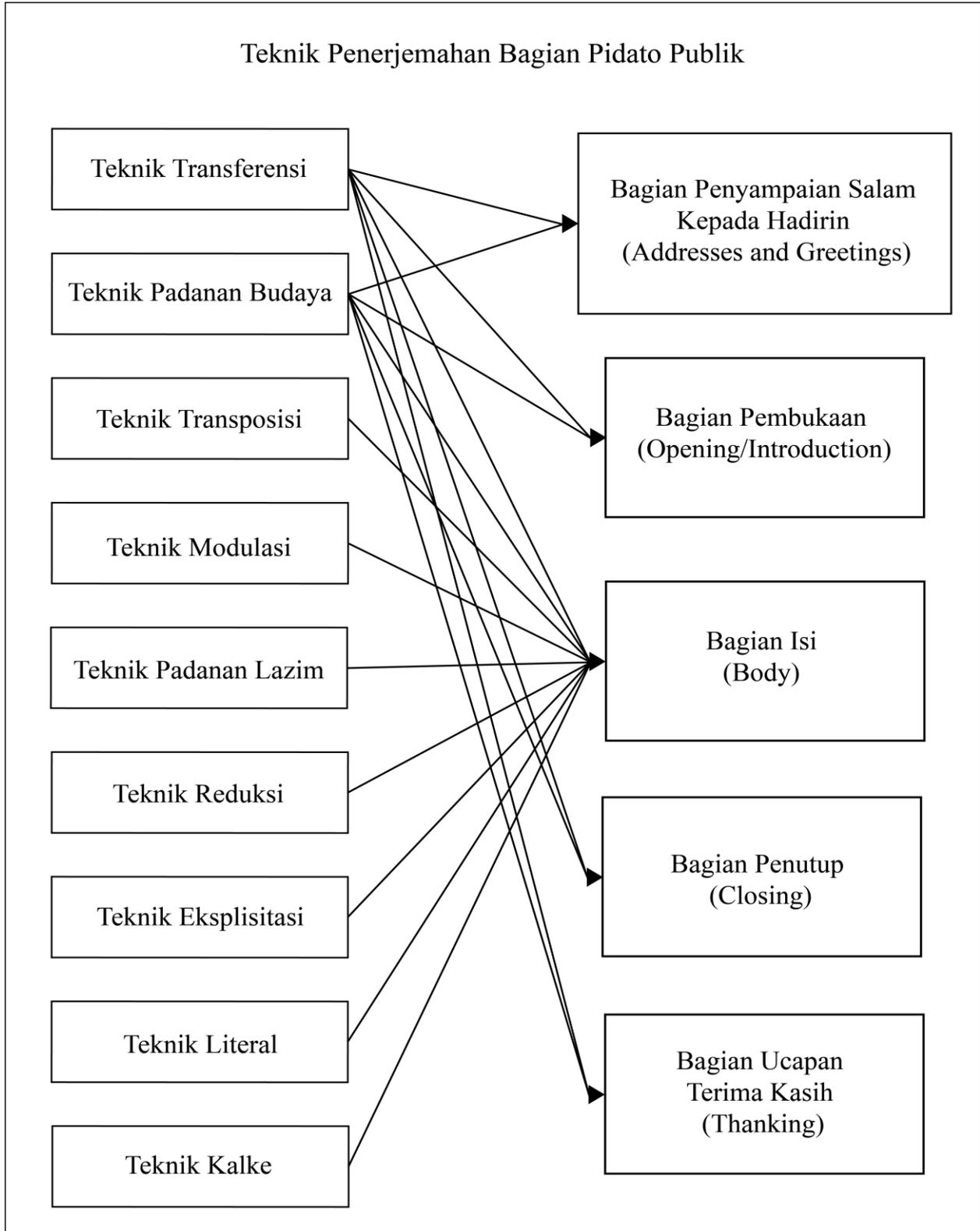
Tabel 1.2

Ringkasan Metode dan Teknik Penerjemahan dalam Penerjemahan
Pidato Politik

Metode Penerjemahan Harfiah	Teknik Penerjemahan Literal	<ul style="list-style-type: none"> - penerjemahan jargon khusus yang belum memiliki padanan resmi - terjemahan jargon khusus dengan melalui penerapan teknik ini lazimnya juga dikenal dalam BSa (berbeda dengan penerapan dengan teknik kalke)
	Teknik Kalke	<ul style="list-style-type: none"> - penerjemahan jargon khusus yang “unik” atau “khas” dalam BSu yang dipertahankan dalam BSa.
Metode Penerjemahan Setia	Teknik Transferensi	<ul style="list-style-type: none"> - penerjemahan salam dan sapaan bernuansa agama, istilah kegamaan
Metode Penerjemahan Semantis	Teknik Eksplisitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan dalam bagian tubuh pidato - Untuk menerjemahkan penggalan kalimat atau frasa. - Untuk memberi penjelasan agar pembaca terjemahan dengan latar budaya berbeda dapat lebih memahami TSa
	Teknik Reduksi	<ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan dalam bagian tubuh pidato - Penerjemah penutur jati bahasa Indonesia cenderung lebih sering menerapkan teknik ini - Ditemuikan penerapan yang tidak tepat dari teknik ini yang memengaruhi terjemahan

		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu pertimbangan yang matang ketika memutuskan untuk melakukan reduksi dalam terjemahan
	Teknik Modulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan dalam bagian tubuh pidato - Kedua penerjemah menerapkan teknik ini dengan tepat
	Teknik Transposisi	<ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan dalam bagian tubuh pidato - Kedua penerjemah menerapkan teknik ini dengan tepat
Metode Penerjemahan Komunikatif	Teknik Padanan Lazim	<ul style="list-style-type: none"> - Diterapkan untuk menerjemahkan nama-nama institusi, organisasi, program, dll - P2 cukup banyak membuat kekeliruan dalam penerapan teknik ini
	Teknik Padanan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Diterapkan untuk menerjemahkan ungkapan salam dan sapaan, sebagai alternatif dari teknik transferensi

Penelitian ini juga menemukan kecenderungan penerapan sembilan teknik penerjemahan diterapkan oleh penerjemah penutur jati bahasa Indonesia dan penutur jati bahasa Inggris dalam menerjemahkan lima bagian pidato politik menurut Mulyana (1999). Kecenderungan penerapan sembilan teknik penerjemahan itu ditunjukkan pada bagan berikut.



Bagan 1.3

Teknik Penerjemahan Bagian Pidato Politik

6. Kesimpulan

Strategi penerjemahan adalah bagian penting dalam proses penerjemahan. Pandangan ini diperkuat oleh Molina dan Albir (2002) yang menyatakan bahwa strategi penerjemahan berperan penting dalam memecahkan masalah penerjemahan dan merupakan pengetahuan yang penting dalam kompetensi penerjemah. Oleh karena itu, strategi penerjemahan yang diterapkan oleh seorang penerjemah juga dapat mencerminkan caranya mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi dalam proses penerjemahan. Cara seorang penerjemah menerapkan strategi penerjemahan dalam kegiatannya diasumsikan dapat memengaruhi kualitas terjemahannya. Dalam penelitian ini, istilah strategi penerjemahan digunakan untuk mencakup teknik penerjemahan, yakni yang digunakan pada tataran frasa dan kata, dan metode penerjemahan, yakni yang digunakan pada tataran kalimat dan di atasnya. Anggapan ini juga diperkuat oleh Molina dan Albir (2002) yang menyatakan bahwa ideologi penerjemahan, metode penerjemahan, dan teknik penerjemahan sebaiknya berfungsi secara harmonis di dalam terjemahan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerjemahan lima pidato politik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, penerjemah penutur jati bahasa Indonesia dan penerjemah penutur jati bahasa Inggris menerapkan strategi penerjemahan yang sama. Penelitian ini mengidentifikasi sembilan teknik penerjemahan yang diterapkan oleh kedua penerjemah dalam menerjemahkan lima pidato politik. Kesembilan teknik penerjemahan itu adalah transferensi, kalke, literal, padanan budaya, terjemahan lazim, transposisi, modulasi, reduksi, dan eksplisitasi. Adapun empat metode penerjemahan diterapkan kedua penerjemah, yaitu metode penerjemahan harfiah (teknik penerjemahan literal dan teknik penerjemahan kalke), metode penerjemahan harfiah (teknik transferensi), metode penerjemahan setia (teknik eksplisitasi, teknik

reduksi, teknik modulasi, dan teknik transposisi), dan metode penerjemahan semantis (teknik padanan budaya).

Adapun dalam empat metode penerjemahan yang teridentifikasi, penelitian ini menyimpulkan adanya dua ideologi penerjemahan dalam terjemahan pidato politik kedua penerjemah, yakni ideologi penerjemahan domestikasi dan ideologi penerjemahan pengasingan. Seperti halnya pada sejumlah penerjemahan lain yang berkiblat kepada dua ideologi penerjemahan itu, penerjemahan pidato politik berkiblat kepada dua ideologi penerjemahan karena ternyata beberapa bagian terjemahan pidato politik berorientasi pada BSu dan beberapa bagian lain pada BSa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam penerjemahan pidato politik, ada sejumlah teknik penerjemahan yang cenderung diterapkan oleh kedua penerjemah dalam menerjemahkan lima bagian pidato berdasarkan pembagian menurut Mulyana (1999), yakni **bagian penyampaian salam kepada hadirin, bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup, dan bagian ucapan terima kasih**. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kecenderungan penerapan teknik penerjemahan untuk lima bagian itu oleh kedua penerjemah, misalnya teknik transferensi atau teknik padanan budaya yang dapat diterapkan dalam bagian pembuka dan bagian penutup. Adapun bagian isi, ditemukan kecenderungan penerapan teknik penerjemahan yang lebih banyak karena bagian isi pidato memang lebih beragam, bergantung dari topik pidato. Temuan ini sebetulnya dapat diterapkan untuk menerjemahkan pidato politik secara keseluruhan karena pada umumnya, pidato politik memiliki format yang hampir sama, seperti halnya menurut pembagian pidato politik menurut Mulyana.

Bertolak dari temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua penerjemah, yang menguasai bahasa pertama yang berbeda, menghasilkan terjemahan yang tidak jauh berbeda. Asumsi awal dari penelitian ini adalah karena arah penerjemahan lima pidato politik ini adalah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris,

penerjemah penutur jati bahasa Inggris akan menghasilkan terjemahan yang lebih baik daripada terjemahan penerjemah penutur jati bahasa Indonesia. Pendapat ini sejalan dengan sejumlah ahli penerjemahan yang berpendapat bahwa penerjemah sebaiknya menerjemahkan ke dalam bahasa yang paling dikuasainya. Salah satunya adalah Newmark (1988, hlm.3) yang menyatakan, "translating into the language of habitual use is the only way you can translate naturally and accurately and with maximum effectiveness."

Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan strategi penerjemahan yang diterapkan, terjemahan kedua penerjemah tidak terlalu berbeda. Temuan dalam penelitian ini juga dapat menyingkap anggapan baru bahwa kualitas terjemahan seorang penerjemah yang menerjemahkan sebuah teks ke dalam bahasa asing juga dapat sama dengan, atau mendekati, kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah yang menerjemahkan sebuah teks ke dalam bahasa yang paling dikuasainya. Memang, dalam hal ini, sejumlah faktor berperan, seperti keahlian menerjemahkan, kompetensi bahasa asing, pengalaman menerjemahkan, atau keahlian khusus seperti menerjemahkan teks yang berlatar bidang yang ia kuasai.

Oleh karena itu, anggapan bahwa penerjemah hanya akan berhasil menerjemahkan teks ke dalam bahasa yang paling dikuasainya perlu ditinjau ulang. Temuan dalam penelitian ini juga menyingkap hal lain dalam penerjemahan yang sebetulnya berperan penting dalam proses penerjemahan, yakni pemahaman TSu, atau menurut Nida (1969) disebut dengan proses "analisis", sebagian satu dari tiga proses penerjemahan menurut Nida (1969) yakni, analisis teks sumber, transfer, dan restrukturisasi. Bagian "analisis" atau "pemahaman Bahasa Sumber" adalah bagian penting dalam proses penerjemahan. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika dalam kasus penerjemahan pidato politik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, penerjemah penutur jati bahasa Indonesia diasumsikan lebih

dapat memahami TSu, terutama untuk teks dengan kompleksitas tinggi seperti teks pidato politik. Beberapa data dalam penelitian ini memang menunjukkan bahwa terjemahan penerjemah penutur jati bahasa Indonesia lebih akurat dibanding dengan terjemahan penutur jati bahasa Inggris.

Maka, penerapan strategi penerjemahan yang tepat dalam penerjemahan pidato politik sangat penting diperhatikan. Selain itu, penerjemah yang menerjemahkan pidato politik, termasuk penerjemah di K/L, sebetulnya juga dapat menerjemahkan pidato politik ke dalam bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan kualitas terjemahan penerjemah penutur jati bahasa Inggris selama menerapkan strategi penerjemahan yang tepat atau memiliki kriteria seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2007). *Meaning and emotiveness in the production and translation of ideology: A case study of the Israeli incursion into the Gaza Strip. (Unpublished MA. Thesis)*. An-Najah National University Nablus.
- Badran, D. (2001). *Modality and ideology in translating political texts*. Nottingham: Linguistic Circular.
- Baker, Mona. (2009). *In other words*. (ed Ke-2). London: Routledge.
- Bassnett, S. (1980). *Translation studies*. London and New York: Routledge.
- Brata, Frans I Made. (2010). Teknik pergeseran dalam penerjemahan sistem sapaan. Dalam *Budaya religi*. Seminar Lokakarya Nasional. Universitas Diponegoro. Diakses di www.eprints.undip.ac.id
- Campbell, Stuart. (1988). *Translation into the second language*. London: Longman.
- Charteris-Black, Jonatan. (2014). *Analyzing political speeches*. London: Palgrave Macmillan
- Colona, Sonia. (2015). *Fundamentals of translation*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Catford, J.C. (1965). *A linguistic theory of translation: An essay in applied linguistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Chilton, Paul. (2004). *Analysing political discourse: Theory and practice*. London: Routledge,
- Erisen, C dan Villalobos, José D. (2014). Exploring the invocation of emotion in presidential speeches. Dalam *Contemporary politics*. (Vol.20). (hlm. 469-488). London: Routledge
- Fawcett, Peter. (1997). *Translation and language*. Manchester: St. Jerome.
- Govindasamy, Subramaniam, Khan, Mahmud Hasan. (2006). Leves of explicitness in political speeches. Dalam: *Journal of cross cultural and interlanguage communication*. (Vol. 25). (hlm. 143-164). London: Multilingua
- Hatim, Basil & Ian Mason. (1997). *The translator as communicator*. London: Routledge.
- _____. (1994) *Discourse and the translator*. London: Pearson Education, 1994
- Hatim, Basil dan Jeremy Munday. (2006). *Translation: An advanced resource book*. New York: Routledge.
- Hatim, Basil. (2001). *Teaching and researching translation*. Harlow: Longman.
- Hoed, Benny Hoedoro. (2006). *Penerjemahan dan kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hornby, Mary Snell. (1992). *Translation studies: An interdiscipline*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- House, Juliane. (2014). *Translation: A multidisciplinary approach*. New York: Palgrave Macmillan.
- _____. (2016). *Translation as communication across languages and cultures*. London: Routledge.
- Krings, Hans Peter. (1986). Translation problems and translation strategies of advanced German learners of French (L2). dalam Juliane House dan Soshana BlumKulka (eds.). *Interlingual and intercultural communication*. Tübingen: Gunter Narr Verlag, hlm. 263—276.

- Koskine, Kaisa (2014). *Institutional translation: the art of government by translation*. Dalam: *Perspectives: Studies in translatology*. London: Routledge.
- Larson, Mildred L. (1984). *Meaning-based translation: Cross-language equivalence*. Boston: University Press of America.
- Löescher, Wolfgang. (1991). *Translation performance, translation process and translation strategies*. Tübingen: Gütersloher Verlagshaus.
- Livnat, Z., & Lewin Beverly A. (2016). *The interpersonal trend of political speech: recruiting the audience in PM Benjamin Netanyahu's Speeches*. *language and dialogue*, 6:2.
- Molina, Lucía dan Amparo Hutardo Albir. (2002). *Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach*. *Meta*. XLVII, 4, 2002, hlm. 498—512.
- Mulyana, Yayan. (2000). *English for public speaking: A practical guide*. Jakarta: Visipro.
- Munday, Jeremy. (2001). *Introducing translation studies: Theories and applications*. London: Routledge.
- _____. (2012) *Evaluation in translation*. London: Routledge.
- Nasution, Zahri. (2007). Bahasa sebagai alat komunikasi politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Dalam: *Sodality: Journal transdisiplin sosiologi, komunikasi, dan ekologi manusia*. (Vol. I:2017). Bogor: Department of Communication Science and Community Development, Faculty of Human Ecology, IPB.
- Newmark, Peter. (1982). *Approaches to translation*. Oxford: Pergamon Press.
- _____. (1987). *A textbook of translation*. New York: Prentice Hall.
- Nida, Eugene. (1964). *Towards a science of translation*. Leiden: Brill.
- _____. (2001). *Contexts in translating*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Nimmo, Dan (1989). *Komunikasi politik: komunikator, pesan dan media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- _____. (2007). *Translating as a purposeful activity*. Pasdtow: St. Jerome Publishing.
- Pamungkas, D. K (2014). *Retorika presiden republik indonesia melalui pesan politik yang disampaikan dalam pidato (analisis isi transkripsi pidato presiden susilo bambang yudhoyono periode tahun 2010 s.d 2013)* Tesis Master, Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Kekhususan Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pym, Anthony. (2010). *Exploring translation theories*. London: Routledge.
- Reiss, Katharina. (2000). *Translation criticism*. Manchester: Jerome Publishing.
- Smith, Craig R. (2009). Contemporary political speech writing. Dalam: *Southern speech communication journal*. (Vol. 42). (Hlm. 52-57). London: Routledge.
- Shunnaq, Abdullah. (2010). Arabic-english translation of political speeches. Dalam: *Perspectives: Studies in translatology*. (Vol.8:3). (Hlm. 207-228). London: Reoutledge.
- Venuti, Lawrence. (2004). *The translation studies reader*. Ed. ke-2. London: Routledge.
- Williams, Jenny & Andrew Chesterman. (2002). *The map: A beginner's guide to doing research in translation studies*. Manchester UK: St. Jerome Publisher.
- Wodak, R. (2004). The power of language in political discourse. Dalam *Journal of Language and Politics* (Vol. 3). (hlm. 381-383.).
- Wodak, R. (2011). *The discourse of politics in action*. New York: Palgrave Macmillan.